

IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

OKTAFIAN PRASTOWO

C100160086

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

OKTAFIAN PRASTOWO
C100160086

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

(Darsono, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI
SURAKARTA**

**OLEH
OKTAFIAN PRASTOWO
C100160086**

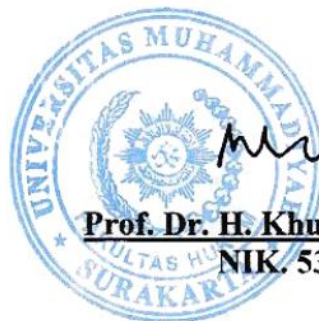
**Telah dipertahankan di depan Dewan penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 13 Oktober 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**


Dewan Penguji:

- 1. Darsono, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Nuswardani, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Ariestya Windiana, S.H., LLM
(Anggota II Dewan Penguji)**

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan Saya di atas, maka akan Saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Oktober 2020

Penulis



OKTAFIAN PRASTOWO

C100160086

IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

Abstrak

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru yang berbeda dari Perma sebelumnya sebagai upaya meningkatkan optimalisasi dan efektivitas mediasi di pengadilan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perma No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana peneliti menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil dari penelitian diketahui bahwa prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta telah dilaksanakan sesuai Perma No 1 Tahun 2016 akan tetapi masih kurang efektif, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi yang tergolong masih rendah. Faktor-faktor penghambat efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu kondisi dari para pihak itu sendiri serta perkara-perkara yang sudah sedemikian rumit dan kompleks. Hal-hal demikian yang kemudian membuat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta berjalan tidak efektif dan sulit terwujud.

Kata Kunci: mediasi, perma no 1 tahun 2016, pengadilan negeri surakarta, mediasi di pengadilan

Abstract

Mediation is a way of resolving disputes through the negotiation process to obtain agreement between the parties, assisted by a mediator. In 2016 the Supreme Court issued Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts which contained new provisions that were different from the previous Perma as an effort to improve the optimization and effectiveness of mediation in court. The purpose of this research was to determine the implementation of Perma No.1 of 2016 in the Surakarta District Court. In this study, researchers used an empirical juridical approach in which the researcher analyzed the problems by combining legal materials which were secondary data with primary data obtained in the field. The results of the study show that the procedure for implementing mediation at the Surakarta District Court has been carried out according to Perma No.1 of 2016 but is still not effective, this can be seen from the relatively low success rate of mediation. The factors inhibiting the effectiveness of mediation in the Surakarta District Court, namely the conditions of the parties themselves and the cases that were already so complicated and complex. These things then make the implementation of mediation at the Surakarta District Court ineffective and difficult to materialize.

Keywords: mediation, perma no. 1 year 2016, surakarta district court, mediation in court

1. PENDAHULUAN

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur hukum di pengadilan ataupun di luar jalur pengadilan (Abbas, 2009). Salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam wilayah hukum privat/perdata adalah mediasi. Christopher W. Moore menyatakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan (Sutiyoso, 2008).

Dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui lembaga pengadilan yang efektif dan efisien, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain pengintegrasian mediasi di pengadilan (Indriati. (2016). Berdasarkan gagasan tersebut Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2003 tersebut telah menjadikan mediasi sebagai suatu kewajiban dalam proses beracara di pengadilan. Sebagai upaya peningkatan efektifitas penerapan mediasi di pengadilan, PERMA No. 2 Tahun 2003 kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan didasarkan alasan Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosuder Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 perlu direvisi

dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses perkara di Pengadilan.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dari PERMA sebelumnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 ini diharapkan mampu meningkatkan optimalisasi dan efektivitas mediasi di pengadilan. Sekaligus memberikan peluang yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai, dan dapat membuka akses yang lebih luas bagi para pihak untuk memperoleh hasil akhir penyelesaian sengketa yang lebih memuaskan serta berkeadilan. Akan tetapi di dalam tatanan praktiknya terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi di pengadilan sehingga mediasi tidak dapat berjalan secara optimal dan efektif, khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu karena pada dasarnya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan sudah demikian rumit dan kompleks, perkara-perkara perdata seperti utang piutang, perlawanan dan sebagainya yang masuk ke Pengadilan ditujukan hanya untuk mengulur waktu pembayaran, mengulur waktu lelang dan sebagainya. Hal-hal demikian yang kemudian membuat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta berjalan tidak efektif dan sulit terwujud.”

Terkait dengan hal tersebut lantas sejauh manakah ketentuan atau prosedur mediasi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tersebut di implementasikan di Pengadilan Negeri Surakarta. Apakah upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan sudah diterapkan sebagaimana mestinya ? Atau apakah pelaksanaan mediasi di pengadilan hanya dilaksanakan sebatas formalitas semata ? Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta”

2. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang

terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimana dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta

3.1.1 Prosedur Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Adapun tahapan-tahapan proses Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dimulai dengan penyusunan resume perkara, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1), bahwa dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Setelah tahap penyerahan resume perkara, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan Mediasi, terkait dengan hal tersebut ketentuan dalam Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kemudian dimungkinkan perpanjangan jangka waktu Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan Para Pihak terhitung sejak berakhir jangka waktu. Dalam pelaksanaan Mediasi tidak tertutup kemungkinan akan menemui kegagalan. Kegagalan Mediasi tersebut tentunya tidak diinginkan, karena hal tersebut akan menambah panjang penyelesaian perkara di kemudian hari. Untuk menyatakan gagal dan tidak layak atas pelaksanaan Mediasi merupakan kewenangan dari mediator. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Satu hal yang menggembirakan dari proses Mediasi adalah tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Perihal tercapainya kesepakatan para pihak diatur dalam Pasal 27. Maka apabila tercapai kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan perdamaian. Selanjutnya para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dituangkan dalam akta perdamaian. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk dikuatkan dengan akta perdamaian maka, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula pernyataan perkara telah selesai. Di sisi lain pelaksanaan Mediasi tidak mencapai kesepakatan, dalam hal ini ketentuan Pasal 32 mengatur sebagai berikut: mediator wajib menyatakan secara tertulis kepada hakim bahwa proses Mediasi telah gagal. Untuk selanjutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku (Rahmah, 2019).

3.1.2 Tahap-Tahap Pelaksanaan Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Tahap pramediasi merupakan tahapan pertama dimana dalam hal ini mediator menyusun langkah serta persiapan sebelum dimulainya mediasi. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi yang selanjutnya (Abbas, 2009). Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana masing masing pihak yang bersengketa dihadapkan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Tahap akhir implementasi hasil mediasi, tahap ini merupakan tahap dimana masing-masing pihak menjalankan hasil-hasil dari kesepakatan, yang telah dituangkan bersama dalam sebuah persetujuan tertulis. Para pihak dalam hal ini menjalankan hasil dari kesepakatan berdasarkan komitmen yang mereka nyatakan selama proses mediasi berlangsung.

3.1.3 Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta

a. Pra Mediasi,

Dimana pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim pemeriksa perkara juga menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang meliputi makna dan tujuan mediasi serta kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan mediasi. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 hari untuk berunding guna memilih mediator. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka yang ditentukan, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan guna memimpin pelaksanaan mediasi. Terkait dengan penunjukan mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta Ninik Hendras Susilowati selaku hakim menyampaikan bahwa : “Yang berwenang menjadi mediator adalah hakim yang di tugaskan oleh pengadilan serta mediator dari luar yang mempunyai sertifikat mediasi yang dikeluarkan oleh kemenkumham. Prosesnya dalam persidangan pertama manakala para pihak dalam hal ini sudah lengkap kemudian majelis hakim akan mempertanyakan kepada masing-masing pihak apakah akan menggunakan mediator dari dalam pengadilan atau dari luar pengadilan, tujuannya agar para pihak memahami apabila para pihak menunjuk mediator dari luar pengadilan dikenakan biaya, dan apabila menunjuk mediator dari dalam pengadilan otomatis karena hal itu merupakan kewajiban bagi hakim berdasarkan SK dari ketua pengadilan untuk ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan. Karena hakim merupakan *ex officium* yang disediakan oleh pengadilan maka apabila mediasi di pimpin oleh hakim pengadilan tidak dikenai biaya, akan tetapi manakala para pihak menunjuk mediator dari luar pengadilan tentunya dikenakan biaya yang ditanggung kedua belah pihak yang disepakati oleh kedua belah pihak”

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Perma No 1 tahun 2016 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau

memaksakan sebuah penyelesaian. Terkait kedudukan sertifikat mediator bagi seorang hakim Ninik Hendras Susilowati lebih lanjut menjelaskan bahwa : “Sebagian besar hakim di Pengadilan Negeri Surakarta pada dasarnya sudah memiliki sertifikat mediator karena sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan mediasi terlebih dahulu, sedangkan pihak luar sebagai mediator dari luar pengadilan dalam hal ini tentunya yang berkualitas dan berkualifikasi serta harus memiliki sertifikat mediator terlebih dahulu. Hakim secara otomatis di setiap pengadilan ada yang sudah secara khusus mendapatkan pelatihan dari Mahkamah Agung, dan seandainya apabila belum pernah mengikuti pelatihan setidaknya di setiap pengadilan itu ada bimbingan-bimbingan teknis yang dilakukan oleh pengadilan tinggi maupun dari ketua pengadilan dalam hal memberikan pemahaman terkait mediasi kepada hakim”

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar hakim yang menjadi mediator di pengadilan Negeri Surakarta pada dasarnya sudah memiliki sertifikat mediator karena sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan mediasi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya apabila para pihak telah memilih mediator atau ketua majelis hakim Pemeriksa Perkara telah menunjuk mediator, maka ketua majelis hakim menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Selanjutnya hakim Pemeriksa Perkara menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.

b. Proses Mediasi

Pelaksanaan mediasi dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Surakarta. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak penetapan perintah pelaksanaan mediasi oleh Hakim pemeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan mediasi tersebut. Dalam pelaksanaan mediasi para pihak diwajibkan untuk hadir, kehadiran para pihak memegang peranan penting dalam upaya mendorong keberhasilan mediasi. Akan tetapi dalam realitanya di Pengadilan Negeri Surakarta masih banyak pihak-pihak yang bersengketa tidak hadir dalam proses pelaksanaan mediasi. Terkait hal tersebut Ninik Hendras

Susilowati selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjelaskan bahwa : “Dalam Perma No 1 Tahun 2016 terdapat ketentuan bahwa dalam hal apabila para pihak tidak memiliki itikad baik, misalkan penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada saat pelaksanaan mediasi mereka tidak hadir, maka dalam hal ini hakim mediator dapat memberikan keterangan kepada ketua majelis bahwa tidak ada itikad baik dari pihak penggugat untuk melakukan mediasi atas dasar ketidakhadiran dari pihak penggugat tersebut. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan Mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan Mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain, dan tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah (Pasal 7 ayat (2) huruf a Perma No 1 Tahun 2016). Selanjutnya berdasarkan pernyataan dari hakim mediator tersebut digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan langsung gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak adanya itikad baik dari pihak penggugat untuk melakukan mediasi. Hal tersebut merupakan poin penting yang terdapat dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang tidak terdapat dalam Perma sebelumnya, dimana dalam hal penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara”

Dalam proses mediasi jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Selanjutnya dalam hal mediasi tidak berhasil, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah

menerima pemberitahuan mediasi tidak berhasil, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta

3.2.1 Faktor para pihak

Tidak adanya kemauan dari para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi. Dalam hal ini pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan tujuannya hanya untuk mengulur waktu pembayaran, mengulur waktu lelang dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran pihak-pihak yang berperkara terhadap tujuan mediasi itu sendiri yaitu untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dalam hal ini mediasi hanya dianggap sebagai suatu formalitas dalam rangkaian proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, sehingga tujuan dari mediasi untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian sulit terwujud.

3.2.2 Faktor Penegak Hukum

Banyaknya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta tidak sebanding dengan jumlah hakim mediator yang memiliki sertifikat. Dimana penegak hukum/hakim di Pengadilan Negeri Surakarta sebagian kecil masih belum memiliki sertifikat mediator. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan pelaksanaan mediasi dipimpin oleh hakim yang belum memiliki sertifikat mediator dan kurang kompeten. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta tentunya dapat berjalan dengan lebih efektif dan optimal apabila dipimpin oleh hakim yang telah memiliki sertifikat mediator.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih berjalan

kurang efektif dimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta tergolong masih rendah.

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta antara lain :
 - a. Faktor para pihak, tidak adanya kemauan dari para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi. Dalam hal ini pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan tujuannya hanya untuk mengulur waktu pembayaran, mengulur waktu lelang dan sebagainya.
 - b. Faktor Penegak Hukum, banyaknya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Surakarta tidak sebanding dengan jumlah hakim mediator yang memiliki sertifikat. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan pelaksanaan mediasi dipimpin oleh hakim yang belum memiliki sertifikat mediator dan kurang kompeten. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta tentunya dapat berjalan dengan lebih efektif dan optimal apabila di pimpin oleh hakim yang telah memiliki sertifikat mediator.

4.2 Saran

1. Mediator dalam melaksanakan mediasi hendaknya mengupayakan solusi-solusi terbaik kepada para pihak secara maksimal serta memberikan pemahaman kepada para pihak terkait tujuan dan manfaat mediasi sehingga kedepannya mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta dapat berjalan dengan lebih efektif.
2. Meningkatkan jumlah personil Hakim bersertifikat mediator di Pengadilan Negeri Surakarta guna meningkatkan peran dan fungsi Hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta, serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Prenada Media Group

- Sutiyoso, Bambang. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta : Gama Media
- Amarini, Indriati. (2016). "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien. *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16 No. 2 Juni 2016. ISSN 1411-9781. DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1954
- Rahmah, Dian Maris. (2019). "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1 (September 2019).